

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS LELANG EKSEKUSI JAMINAN KREDIT PERBANKAN

(Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbh)

Oleh:

FAISAL ALSY

Jaminan kredit berfungsi sebagai garansi bahwa debitur dapat melunasi utangnya. Jika terjadi permasalahan kredit, jaminan juga berfungsi sebagai pengganti utang debitur. Pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbh, dalam perjanjian kreditnya terdapat jaminan berupa Asuransi Jiwa dan Hak Tanggungan. Saat kredit berlangsung debitur meninggal dunia yang mengakibatkan di eksekusinya Hak Tanggungan, karena debitur tidak dapat melunasi utangnya. Terhadap eksekusi ahli waris debitur merasa keberatan dengan alasan masih terdapat Asuransi Jiwa dalam perjanjian kredit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan dari jaminan-jaminan kredit perbankan, dimana kreditur melakukan eksekusi terhadap salah 1 (satu) jaminan yaitu Hak Tanggungan. Hak Tanggungan tersebut selanjutnya dilelang, kemudian terhadap proses lelang tersebut dipermasalahkan prosesnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian secara deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Kemudian data diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematika data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan Asuransi Jiwa kedudukannya lebih utama dalam pelunasan kredit daripada jaminan Hak Tanggungan. Hal itu hanya berlaku apabila semua syarat dari kedua jaminan terpenuhi. Untuk kredit pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbh, hanya Hak Tanggungan yang dapat menjadi pengganti utang debitur. Fakta bahwa telah dihilangkannya Asuransi Jiwa pada addendum kedua perjanjian kredit menjadikan Hak Tanggungan sebagai satu-satunya jaminan. Berdasarkan hal tersebut, maka kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap Hak Tanggungan. Pada pelaksanaan lelang Hak Tanggungan ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan dokumen khusus berdasarkan Peraturan Menteri Kuangan Nomor 123/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Bahwa wajib adanya pemberitahuan kepada debitur dan adanya pengumuman melalui surat kabar, sehingga terhadap proses pelaksanaan lelangnya Lbh timbul ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Hak Tanggungan, Jaminan, Lelang.*

ABSTRACT

JURIDICIAL ANALYSIS OF BANKING CREDIT GUARANTEE EXECUTION AUCTIONS

(Case Study Number 5/Pdt.G/2021/PN Lbh)

By

FAISAL ALSY

Credit collateral functions as collateral so that debtors can pay off their debts. If bad credit occurs, collateral also functions as a replacement for the debtor's debt. In Decree Number 5/Pdt.G/2021/PN Lbh, in the credit agreement there is collateral in the form of Life Insurance and Mortgage Rights. While the credit is in progress, the debtor dies which results in the execution of the mortgage right, because the debtor cannot pay off the debt. Regarding this execution, the debtor's heirs felt approved on the grounds that there was still Life Insurance in the credit agreement. The problem in this research is regarding the position of bank credit guarantees, where the creditor executes 1 (one) guarantee, namely Mortgage Rights. The mortgage rights are then auctioned, and then the auction process is questioned.

This type of research is normative legal research with descriptive research type. The problem approaches used are the statutory regulations approach and the case approach. Data collection was carried out by literature study and document study. Then the data is processed through data examination, data classification, and data systematics, and analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that Life Insurance guarantees are more important in repayment of credit than mortgage guarantees. This only applies if all the conditions of both guarantees are met. For credit in Decision Number 5/Pdt.G/2021/PN Lbh, only Mortgage Rights can be a substitute for the debtor's debt. With the elimination of Life Insurance in the second addendum to the credit agreement, the Mortgage is the only collateral. Based on this, creditors have the right to execute Mortgage Rights. In the implementation of the Mortgage Rights auction, discrepancies were found with statutory regulations, namely the failure to fulfill special document requirements based on Minister of Finance Regulation Number 123/PMK.06/2020 concerning Auction Implementation Instructions. That there must be notification to the debtor and an announcement in the newspaper, so that in the process of holding the auction there will be discrepancies with statutory regulations.

Keywords: *Deceased Customer, Guarantee, Auction.*